



Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

Febrianaseery Muharram¹, Irfan Nursetiawan², Asep Nurwanda³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email : febrianaseery@gmail.com

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer (wawancara dan observasi) serta sumber data sekunder (dokumen). Dalam pelaksanaan wawancara dilakukan kepada 6 informan dengan penentuan informan melalui Teknik Purposive Sampling, sedangkan observasi dilakukan secara partisipan. Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (PKK Berbasis SMEP) di Desa Margamulya belum terlaksana secara optimal, meskipun komitmen para pelaksana sudah sangat tinggi. Kendala utama terletak pada dimensi Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi yang belum optimal. Hambatan yang paling signifikan mencakup keterbatasan waktu para pelaksana karena kesibukan ganda, kurangnya pemahaman teknis mendalam terutama dalam aspek SMEP, proses pencairan anggaran yang lambat dan keterbatasan fasilitas modern, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta koordinasi antarpihak yang belum terintegrasi secara sistematis. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi intensif, penyesuaian jadwal, pengadaan forum diskusi dan bimbingan teknis, optimalisasi fasilitas, serta pembentukan forum multi-pihak, kompleksitas tantangan ini masih menghambat tercapainya tujuan program secara maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga, dan SMEP.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin (Ristiani, Y., dkk. 2022). Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, di bentuk program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Martin, dkk., 2023).

Berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia melalui

pemberdayaan yang berkelanjutan. Perpres ini menetapkan kerangka kebijakan, pedoman, dan struktur program yang harus diikuti oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/Kabupaten, maupun desa. Program ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, dengan tujuan akhir untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/Kabupaten. Permendagri ini dikeluarkan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

Salah satu prinsip utama dalam Perpres dan Permendagri adalah pemberdayaan keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi, dengan fokus pada Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa area prioritas yang menjadi fokus program pemberdayaan keluarga antara lain: Peningkatan Kesehatan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Kelembagaan Keluarga.

Pada tahap supervisi, pihak yang bertanggung jawab, seperti tim penggerak PKK desa dan kecamatan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Perpres dan rencana kerja. Di Desa Margamulya, supervisi dilakukan dengan mendatangi lokasi-lokasi kegiatan, seperti tempat pelatihan keterampilan atau posyandu, dan berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat untuk mengevaluasi keberhasilan program.

Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program secara terus-menerus. Hal ini mencakup pengumpulan data secara periodik tentang capaian, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan. Di Desa Margamulya, monitoring dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan kecamatan dan

desa, yang rutin mengumpulkan laporan dan data dari setiap kegiatan yang dilakukan. Monitoring juga berfungsi untuk mengidentifikasi jika ada kegiatan yang kurang efektif atau memerlukan penyesuaian.

Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas program dalam jangka panjang. Di Desa Margamulya, evaluasi dilakukan secara tahunan atau pada akhir setiap siklus program untuk melihat apakah tujuan pemberdayaan keluarga telah tercapai. Tim evaluasi akan menilai keberhasilan dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial keluarga. Evaluasi ini juga mencakup analisis data untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan dalam kondisi keluarga, seperti peningkatan pendapatan atau penurunan angka kemiskinan.

Pelaporan menjadi tahap yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan, baik kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Di Desa Margamulya, laporan ini mencakup data tentang jumlah peserta program, indikator keberhasilan yang tercapai, serta kendala yang dihadapi. Pelaporan ini juga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di masa depan.

Di Desa Margamulya, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berbasis SMEP sangat relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Desa ini memiliki berbagai tantangan terkait kemiskinan, akses pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan keluarga. Melalui pendekatan SMEP, Desa Margamulya telah berhasil melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga, terutama keluarga-keluarga miskin. Misalnya, dalam bidang kesehatan, program yang difokuskan pada peningkatan pelayanan posyandu untuk ibu hamil dan balita terus diawasi melalui sistem supervisi dan monitoring. Kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil, juga dipantau secara ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Namun, munculnya fenomena masalah yang terjadi dalam implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berbasis Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) di Desa Margamulya, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Keterbatasan SDM,

anggaran, serta partisipasi masyarakat yang rendah, bersama dengan masalah infrastruktur dan koordinasi antar stakeholder, mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di desa, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program.

Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berbasis Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) di Desa Margamulya, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi masalah terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan program, terutama terkait dengan pemahaman yang kurang memadai mengenai proses supervisi, monitoring, dan evaluasi yang tepat. Hal ini menyebabkan laporan yang dihasilkan kurang akurat dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang efektif.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai tujuan dan manfaat program menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, yang berimbas pada efektivitas pelaksanaan program yang terhambat. Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan sistem pelaporan dan pengelolaan program juga menjadi kendala besar, dengan data yang tidak terkoordinasi dengan baik dan sulit dianalisis, mengurangi efektivitas evaluasi. Terlebih lagi, terbatasnya anggaran dan infrastruktur yang mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi semakin memperburuk keadaan, mengingat program tidak dapat dijalankan dengan optimal tanpa dukungan yang memadai. Selain itu, meskipun ada mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan, proses tindak lanjut dari hasil evaluasi seringkali tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga masalah-masalah yang terdeteksi dalam evaluasi tidak segera diperbaiki. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi program PKK berbasis SMEP, sehingga perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Margamulya.

Program pemberdayaan keluarga seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran, baik dari sisi dana yang tersedia maupun akses terhadap sumber daya material lainnya. Meski ada anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga, jumlah dana tersebut sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional program secara menyeluruh, seperti biaya pelatihan, fasilitas kesehatan, atau

bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Terbatasnya anggaran ini dapat membatasi cakupan program, misalnya hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari keluarga yang membutuhkan atau tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini berdampak pada rendahnya hasil yang dicapai, yang seharusnya memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di desa, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program (Nursetiawan, dkk. 2024). Dengan perbaikan dalam hal ini, diharapkan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Margamulya.

Adapun hasil pengamatan (observasi) awal penulis di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terlihat bahwa Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan belum berjalan optimal. Terbukti dengan beberapa indikator permasalahan, sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi atau Peraturan Desa yang mengatur mengenai Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
2. Belum maksimalnya alur komunikasi antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat. Misalnya Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas atau tepat waktu mengenai prosedur program, sehingga menghambat partisipasi aktif mereka.
3. Terbatasnya alokasi dan distribusi sumber daya memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Misalnya Kurangnya tenaga pendamping atau fasilitator, anggaran yang dialokasikan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang minim untuk mendukung program di tingkat desa.
4. Ketidaksesuaian antara sikap, komitmen, dan kepemimpinan pengelola program dengan tujuan program. Misalnya Kepala desa atau pengelola program tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong keberhasilan program, atau mereka kurang memahami urgensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

5. Prosedur birokrasi yang rumit dan lambat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kelancaran implementasi program. Misalnya Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam program pemberdayaan keluarga, sehingga pengambilan keputusan terkait implementasi program berjalan lambat dan tidak efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang dilakukan oleh penulis kurang lebih selama 9 Bulan terhitung dari Bulan November 2024 sampai dengan Juli 2025. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang seluruhnya berasal dari Perangkat Desa dan Unsur Kelembagaan Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dengan pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:321) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, di bentuk program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

1. Dimensi Faktor Komunikasi (*Communication*)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pada dimensi Komunikasi terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya, menunjukkan pada pelaksanaan yang belum optimal. Hal ini terlihat jelas dari dua indikator utama yang belum maksimal. Pertama, indikator kemudahan akses informasi yang masih terbatas, di mana meskipun informasi tersedia di tingkat struktural, penyebarannya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang familiar dengan media digital atau berada di pelosok, masih belum merata. Kedua, indikator sosialisasi sebelum pelaksanaan program yang meskipun sudah dilakukan, namun belum efektif dalam membangun pemahaman yang seragam dan partisipasi aktif dari seluruh target sasaran program, seringkali karena metode penyampaian yang kurang variatif dan jangkauan yang belum menyeluruh.

2. Dimensi Sumber Daya (*Resources*)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pada Dimensi Sumber Daya (*Resources*) terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya, menunjukkan pada pelaksanaan yang belum optimal. Hal ini terlihat jelas dari dua indikator utama yang belum maksimal. Pertama, indikator adanya petugas pelaksana yang kompeten, di mana meskipun para pelaksana memiliki komitmen dan pemahaman dasar, kemampuan teknis mereka dalam mengelola aspek SMEP secara mandiri dan sistematis masih perlu ditingkatkan. Kedua, indikator adanya fasilitas penunjang, di mana meskipun fasilitas dasar tersedia, ketersediaan fasilitas yang lebih modern dan spesifik untuk mendukung proses SMEP, seperti akses internet stabil, perangkat komputer, dan sistem pengelolaan data digital, masih sangat terbatas.

3. Dimensi Disposisi (*Disposition*)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pada Dimensi Disposisi (*Disposition*) terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya, menunjukkan pada pelaksanaan yang sudah optimal. Hal ini terlihat jelas dari dua indikator utama yang sudah maksimal. Pertama, indikator adanya komitmen untuk melaksanakan program, di mana seluruh pelaksana menunjukkan partisipasi aktif yang tinggi, dedikasi waktu dan tenaga, serta inisiatif proaktif dalam mendukung program. Kedua, indikator adanya petugas pelaksana yang kompeten, di mana meskipun ada area

yang perlu penguatan (seperti detail teknis SMEP), secara umum para pelaksana memiliki pemahaman dasar dan semangat yang kuat, serta menunjukkan kemauan belajar yang tinggi, yang menjadi pondasi disposisi positif dalam menjalankan program.

4. Dimensi Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pada Dimensi Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya, menunjukkan pada pelaksanaan yang belum optimal. Hal ini terlihat jelas dari dua indikator utama yang belum maksimal. Pertama, indikator adanya kejelasan tugas dan fungsi, di mana meskipun ada pembagian tugas secara umum, detail operasional dan alur kerja antar unit terkait program SMEP belum sepenuhnya terperinci dan dipahami merata oleh semua pihak. Kedua, indikator adanya kerja sama yang terbangun, di mana meskipun ada niat baik untuk berkolaborasi, namun koordinasi antar unit dan pihak terkait (termasuk integrasi data) masih belum sistematis dan inklusivitas forum koordinasi belum menyeluruh, sehingga menghambat sinergi optimal.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (PKK Berbasis SMEP) di Desa Margamulya belum terlaksana secara optimal. Pada dimensi Disposisi (*Disposition*), komitmen para pelaksana sudah optimal, ditunjukkan oleh partisipasi aktif dan dedikasi mereka yang tinggi. Namun, dimensi Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) masih belum optimal.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu dan kesibukan para pelaksana, dimana para kader dan anggota PKK di Desa Margamulya adalah ibu rumah tangga atau memiliki pekerjaan lain, sehingga sulit untuk mengalokasikan waktu yang cukup dan konsisten untuk semua tahapan program PKK Berbasis SMEP, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kesibukan ganda ini dapat memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas-tugas program
2. Kurangnya pemahaman teknis yang mendalam terutama dalam aspek SMEP, banyak pelaksana program PKK yang belum sepenuhnya memahami konsep, metodologi, dan instrumen yang tepat untuk melakukan SMEP secara efektif. Hal

ini dapat menyebabkan data yang kurang akurasi, analisis yang tidak maksimal, dan rekomendasi yang kurang tepat sasaran, sehingga mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.

3. Proses pencairan anggaran yang kadang lambat dan kurang fleksibel, serta keterbatasan fasilitas penunjang modern. Penundaan pencairan dana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bahkan berpotensi menunda keseluruhan program. Selain itu, keterbatasan fasilitas penunjang modern seperti akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, atau bahkan sarana transportasi, juga menyulitkan proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang efisien dan akurat.
4. Partisipasi masyarakat belum merata, khususnya pada tahapan perencanaan dan evaluasi, disertai kurangnya inisiatif mereka dalam memberikan masukan. Di Desa Margamulya, partisipasi masyarakat dalam program PKK Berbasis SMEP belum merata, terutama pada tahapan krusial seperti perencanaan program dan evaluasi dampaknya. Masyarakat cenderung pasif dan kurang memiliki inisiatif untuk memberikan masukan, ide, atau kritik yang konstruktif. Hal ini dapat menyebabkan program menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan mengurangi rasa kepemilikan mereka terhadap program tersebut.
5. Koordinasi antarpihak yang belum terintegrasi sistematis dan belum adanya forum koordinasi yang inklusif untuk seluruh pemangku kepentingan. Di Desa Margamulya, koordinasi antarpihak masih belum terintegrasi secara sistematis. Belum ada forum koordinasi yang inklusif dan rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan program, mengatasi kendala, dan menyinergikan upaya. Akibatnya, informasi sering terputus, tumpang tindih program terjadi, dan potensi kolaborasi menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi yang lebih intensif, berarti tidak hanya menyampaikan informasi satu kali, tetapi secara berulang dan melalui berbagai saluran. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan tatap muka yang lebih sering di setiap RT/RW, menggunakan media komunikasi lokal seperti pengumuman di masjid/mushola, papan informasi desa, atau bahkan siaran radio komunitas jika ada.

2. Penyesuaian jadwal kegiatan agar lebih fleksibel, Misalnya, mengadakan pertemuan atau pelatihan di luar jam kerja utama, seperti sore hari, malam hari, atau akhir pekan, yang umumnya lebih memungkinkan bagi ibu rumah tangga atau mereka yang memiliki pekerjaan lain.
3. Pengadaan forum diskusi internal dan bimbingan teknis oleh tim pendamping desa. Forum ini menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi. Selain itu, bimbingan teknis secara langsung dan berkelanjutan oleh tim pendamping desa atau fasilitator yang berkompeten dalam aspek SMEP sangat dibutuhkan.
4. Optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada sambil mengusahakan pengadaan fasilitas tambahan melalui pengajuan anggaran, perencanaan anggaran yang lebih detail dan transparan,
5. Pembentukan forum diskusi multi-pihak yang terstruktur, serta pengaktifan grup komunikasi digital dan pertemuan rutin untuk kader.

Dengan demikian, meskipun terdapat komitmen yang kuat dari para pelaksana, kompleksitas dalam komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya struktur birokrasi, menyebabkan Implementasi Program PKK Berbasis SMEP di Desa Margamulya secara keseluruhan belum berjalan optimal. Tantangan ini memerlukan perhatian dan strategi berkelanjutan untuk memastikan program dapat mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara maksimal.

KESIMPULAN

Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (PKK Berbasis SMEP) di Desa Margamulya belum terlaksana secara optimal, meskipun komitmen para pelaksana sudah sangat tinggi. Kendala utama terletak pada dimensi Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi yang belum optimal. Hambatan yang paling signifikan mencakup keterbatasan waktu para pelaksana karena kesibukan ganda, kurangnya pemahaman teknis mendalam terutama dalam aspek SMEP, proses pencairan anggaran yang lambat dan keterbatasan fasilitas modern, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta koordinasi antarpihak yang belum terintegrasi secara sistematis. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi intensif, penyesuaian jadwal, pengadaan forum diskusi dan bimbingan teknis, optimalisasi fasilitas, serta pembentukan forum multi-

pihak, kompleksitas tantangan ini masih menghambat tercapainya tujuan program secara maksimal.

Untuk mengoptimalkan implementasi Program PKK Berbasis SMEP di Desa Margamulya, disarankan untuk fokus pada penguatan kapasitas teknis melalui pelatihan SMEP berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dengan forum diskusi inklusif dan sosialisasi yang beragam, optimalisasi sumber daya dengan fleksibilitas jadwal dan percepatan anggaran, serta penguatan koordinasi multi-pihak melalui forum terstruktur. Pendekatan ini akan membantu mengatasi hambatan yang ada dan memastikan program berjalan lebih efektif untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Balthasar Watunglawar dan Katarina Leba, “Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. I, No. I, 2020, 10-24, 19.
- Diputra, I. K. D. R., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Kecamatan Tabanan). *Socio-political Communication and Policy Review*.
- Mardhatillah, M. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 76-87.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. “Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa,” *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 78.
- Martin, D., Harihanto, H., & Situmorang, D. L. (2023). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelaksanaan Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Prodi Pembangunan Sosial*, 11, 402-23.
- Muslihin. R. (2016). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 18, 24. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/1145/982>
- Noor, S. S. A. (2022). Supervisi Dalam Monitoring Tugas Pendamping di Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 33-41.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Anwar, A. N. R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). Pelatihan Digital Leadership Bagi Perangkat Desa Di Desa

*Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Supervisi Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di Desa Margamulya Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya*

Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. MALLOMO: Journal of Community Service, 4(2), 351-360.

Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 262-289.

Ristiani, Y., Suparman, A. N., & Nurwanda, A. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Saifudin, S., Rahman, G., & Agustina, S. E. (2023). Pencegahan Stunting Melalui Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kabupatenbaru. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 255-264.

Saifudin, S., Rahman, G., & Agustina, S. E. (2023). Pencegahan Stunting Melalui Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lalapin Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 255-264.